

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan menjadi sarana kunci tercapainya suatu negara yang ideal. Secara umum pembangunan merupakan usaha dan proses untuk menuju perubahan yang lebih baik, dengan kata lain terdapat peningkatan dari tahun yang telah berjalan. Hal yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan haruslah mencakup perubahan yang lebih baik diberbagai aspek, selain itu pembangunan harus dilakukan berkesinambungan dengan disesuaikan pada prioritas aspek yang paling penting, dan kebutuhan yang diperlukan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM digunakan untuk mengetahui sebuah negara tersebut negara berkembang atau negara maju dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan sarana dan prasarana yang jelas.

Todaro & Smith (2006) dalam Rosiana (2021 : 1) menyatakan “Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa komponen diantaranya yaitu kecukupan, jati diri dan kebebasan yang menjadi tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat”. Dalam hal ini pembangunan manusia menjadi sentral untuk mencapai indikator kemajuan negara. Suatu negara

dikatakan maju tidak hanya diukur dari besarnya produk domestik bruto (PDB) saja, namun juga dilihat berdasarkan kualitas manusianya. Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperluas fungsi dan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan manusia. Fridaragma (2015 : 1) menyatakan :

Pada konsep pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri dan bukan merupakan alat dari pembangunan. Perkembangan metodologi IPM 2010 Angka harapan hidup (AHH) Angka harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) Produk nasional bruto (PNB). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Pencapaian indeks pembangunan manusia dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan gambaran dan persentase akan tercapainya suatu negara yang ideal. Mulyadi (2008) dalam Manik (2020 : 9-10) menyatakan :

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia yaitu :

1. Usia harapan hidup

Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup meliputi :

- a. Angka kematian bayi.
- b. Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
- c. Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
- d. Persentase penduduk yang sakit “morbiditas”.
- e. Rata-rata lama sakit.
- f. Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
- g. Persentase kelahiran ditolong yang ditolong oleh tenaga medis.
- h. Persentase balita kekurangan gizi.
- i. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih.
- j. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah yang berlantai tanah.
- k. Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
- l. Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

2. Pengetahuan

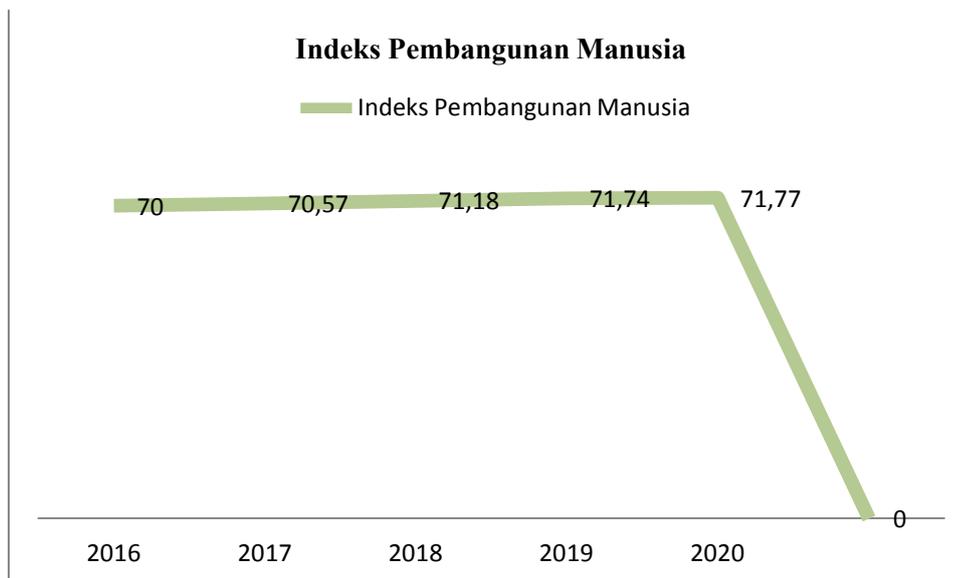
Pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. indikator pendidikan ini meliputi:

- a. Angka melek huruf.
 - b. Rata-rata lama sekolah.
 - c. Angka partisipasi sekolah.
 - d. Angka putus sekolah “Drop Out/DO” dan lain-lain.
3. Standar hidup layak
- Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak indikator standar hidup layak bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:
- a. Jumlah yang bekerja.
 - b. Jumlah pengangguran terbuka.
 - c. Jumlah dan persentase penduduk miskin.
 - d. PDRB rill perkapita.

Sehingga dalam perhitungan dengan unsur tersebut kita dapat mengetahui angka indeks pembangunan manusia di negara Indonesia bahkan di provinsi yang ada di Indonesia.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki indeks pembangunan manusia diatas rata-rata IPM nasional. Meski secara nasional sudah berada diangka IMP nasional. Rahadian (2020 : 1) menyatakan : “masih ada sejumlah daerah yang memiliki tingkat pembangunan manusia dibawah rata-rata. BPS mencatat 11 provinsi memiliki IPM sedang atau berada pada kisaran 60-70” Kesebelas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, Provinsi Sumatera Utara tidak terdaftar dikarenakan IPM sudah mencapai level nasional. Capaian tersebut membuat Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang IPM untuk Indonesia. Semakin tinggi IPM daerah Provinsi Sumatera Utara semakin baik pula kontribusi IPM daerah tersebut. Namun hal tersebut belum cukup memuaskan “Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mencanangkan agar IPM mencapai level 71,98 pada tahun 2019” di beritakan dalam surat kabar lokadata (Rahadian 2020 : 1). Yang artinya

diharapkan pada tahun 2019 angka IPM sudah mencapai angka 71,98 . Dalam hal tersebut kita dapat melihat perkembangan IPM di Provinsi Sumatera Utara pada Gambar 1.1 :



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia sumut.bps.go.id (2016-2020)

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020

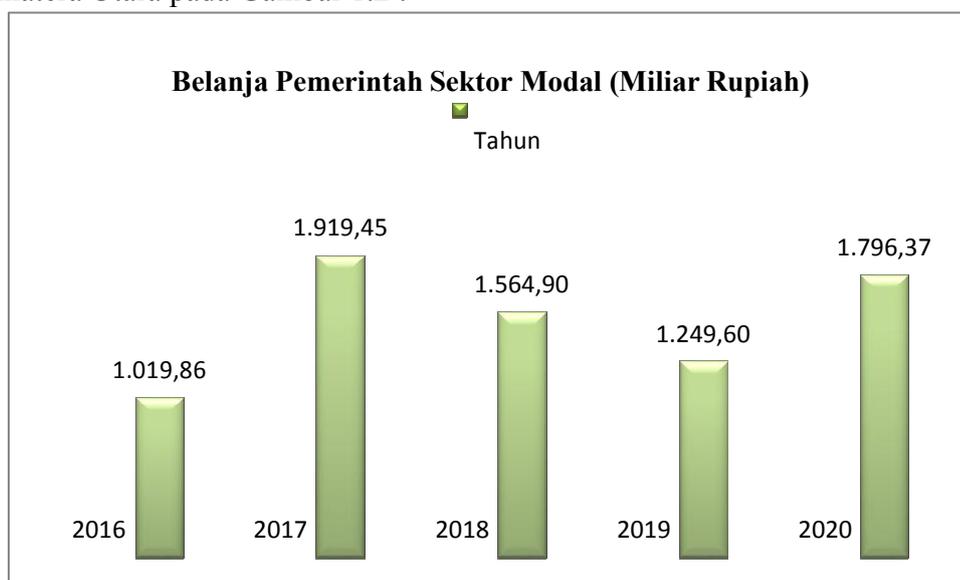
Dari Gambar 1.1 di atas menjelaskan bahwa IPM selalu mengalami peningkatan namun belum memenuhi target pencapaian yang dicanangkan Bapak Jokowi. Dimana pencapaian masih 71,77 untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara sedangkan pencapai yang dibutuhkan yaitu 71,98. Untuk mencapai hal tersebut perlunya campur tangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang extra dalam mencapai IPM yang ditargetkan. Dalam menjalankan strateginya pemerintah tentu memerlukan dana yang digunakan untuk membiayai sektor publik yang penting. Kebijakan pemerintah dalam membantu dana dalam bentuk realisasi belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Halim (2002) dalam Setiawan (2015 : 1289) menyatakan bahwa:

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah, belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan yang bersinggung langsung dengan pelayanan publik.

Untuk itu kita dapat melihat data belanja pemerintah sektor modal daerah provinsi

Sumatera Utara pada Gambar 1.2 :



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumut.bps.go.id (2016-2020)

Gambar 1. 2 Belanja Pemerintah Sektor Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan data belanja pemerintah sektor modal periode 2016-2020 daerah Provinsi Sumatera Utara. Pengeluaran belanja pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi. Kontribusi realisasi APBD dalam bentuk belanja pemerintah sektor modal pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang drastis yaitu Rp 1.919.45 Miliar pada tahun 2018 dan 2019 menurun hingga diangka Rp

1.249.60 Miliar kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan diangka Rp 1.796.37 Miliar.

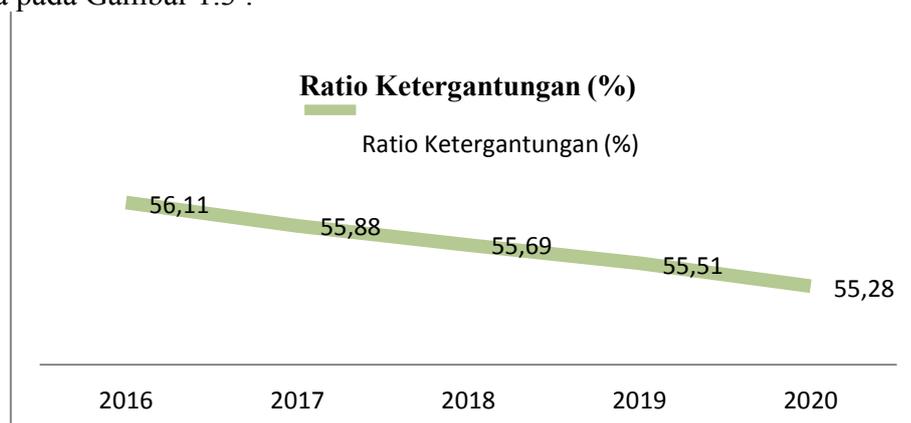
Hal lain yang mempengaruhi tingkat pembangunan manusia yaitu angka ratio ketergantungan. “Ratio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Jika ratio ketergantungan tinggi maka akan berpengaruh pada IPM karena akan lebih banyak beban yang akan ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif” (Kuncoro 2010 dalam Rosiana 2021 : 4).

Menurut Purba, Tobing & Hutabarat (2015 : 47) menyatakan bahwa :

Indonesia termasuk dalam struktur usia penduduk muda. Struktur usia muda ini akan menyebabkan beban tanggungan semakin besar. Beban tanggungan (dependency ratio) adalah rasio antara penduduk bukan usia kerja dengan jumlah penduduk usia kerja, yang berarti angka beban tanggungan akan semakin besar apabila penduduk usia sampai 14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun keatas semakin besar.

Maka dari itu kita dapat melihat data ratio ketergantungan di Provinsi Sumatera

Utara pada Gambar 1.3 :



Sumber : Penduduk sumut.bps.go.id (2016-2020)

Gambar 1. 3 Ratio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara 2016- 2020

Pada Gambar 1.3 Ratio ketergantungan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun

2016 hingga 2020 mengalami penurunan. Namun hal tersebut sangat baik dikarenakan angka beban ketergantungan semakin sedikit dari tahun ketahun. Dengan beban ketergantungan diangka 55.28 % pada tahun 2020 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban sebanyak 55 penduduk usia tidak produktif.

Selain faktor belanja modal pemerintah dan ratio ketergantungan jumlah penduduk miskin juga berpengaruh terhadap IPM. Chalid & Yusuf (2014 : 3) menyatakan bahwa : “Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Bappeda. 2011) oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai IPM”. Dan juga dalam penjelasan konsep pembangunan manusia juga menjelaskan tujuan akhir dari pembangunan yang mencakup pendidikan kesehatan dan produktifitas manusia.

Fridarahma (2015 : 1) menyatakan bahwa :

Konsep Pembangunan Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang. sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Pembangunan manusia didefenisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*).

Apabila jumlah penduduk miskin terus dibiarkan meningkat maka tingkat kesejahteraan manusia akan mengalami penurunan yaitu umur pendek, tidak sehat dan kehidupan yang tidak produktif. Untuk itu kita dapat melihat Gambar 1.4 :



Sumber : Kemiskinan sumut.bps.go.id (2016-2020)

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Miskin Povinsi Sumatera Utara 2016-2020

Dari Gambar 1.4 jumlah penduduk miskin dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dari 1.455.95 ribu jiwa hingga turun 1.282.04 ribu jiwa. Namun pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu dari 1.282.04 ribu jiwa meningkat menjadi 1.283.29 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara salah satunya dampak kovid 19. Peningkatan tersebut menjadi hal dasar untuk diketahui hubunganya terhadap IPM Provinsi Sumatera Utara yang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena di atas. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Ratio Ketergantungan dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh belanja pemerintah sektor modal terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020?
2. Bagaimanakah pengaruh ratio ketergantungan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020?
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor modal terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh ratio ketergantungan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori. minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh belanja pemerintah sektor modal ratio ketergantungan dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.
2. Kegunaan praktis secara praktis mamfaat yang diharapkan dapat diperoleh

melalui temuan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Ipm. kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam menaikkan IPM. Pemerintah mendapat informasi yang memadai dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi penduduk miskin, hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk informasi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara..
- c. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis.
- d. Bagi mahasiswa dan pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan dan pembanding bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Manusia

“Pembangunan manusia adalah sebuah proses untuk memperluas pilihan bagi masyarakat yaitu agar mereka dapat memperoleh lebih banyak kemampuan dan menikmati lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuan tersebut” (Trianto 2017 : 10). Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional (BPS 2020) perbedaan cara pandang tersebut antara lain :

1. Pertumbuhan PNB merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan PNB saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun PNB atau pendapatan perkapita bertumbuh tinggi atau sebaliknya.
2. Teori pertumbuhan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya hanya berfokus dengan sisi penawaran, dimana manusia dipandang sebagai alat untuk kemajuan produksi komoditas. Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat karena manusia adalah agen aktif dari kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
3. Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan dari pada sebagai peserta didalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi dari pada struktur

produksi.

4. Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat seperti makanan, tempat tinggal, pakaian perawatan kesehatan dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia

Gagasan pembangunan manusia pada mulanya dikemukakan oleh UNDP pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Rahadian (2015 : 1) menyatakan “Menurut BPS indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis komponen dasar kualitas hidup. Angka harapan hidup (AHH) Angka harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) Produk nasional bruto (PNB)”. Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain pencapaian indeks pembangunan manusia dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan gambaran dan persentase akan tercapainya suatu negara yang ideal. dalam pelaksanaan pembangunan manusia terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian utama UNDP (1995) dalam Rosiana (2021 : 15-16) yaitu :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk. tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara keseluruhan. dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya peningkatan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Fridarahma (2015 : 1) menyatakan : “Pembangunan manusia merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjelaskan kehidupan yang produktif”. Maka UNDP 1990 juga merumuskan empat pilar pendukung pelaksanaan pembangunan manusia. diantaranya yaitu :

1. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerja berupah. Oleh karna itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

2. Ekuitas

Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh mamfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

3. Kesinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Rosiana (2021 : 16) menyatakan :

Pada hakikatnya pembangunan manusia memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat. sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek. Selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya, serta aspek lainnya dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana masyarakat mengakses hasil pembangunan dalam mendapatkan kesehatan, pendapatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun perhitungan IPM dibagi dengan dua metode yaitu, metode lama dan metode baru. Metode lama menggunakan indikator angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), dan rata-rata lama sekolah (RLS), produk domestik bruto (PDB). Berbeda halnya dengan IPM metode baru yang mana indikatornya mengalami perubahan angka melek huruf (AMH) diganti dengan harapan lama sekolah (HLS) dan produk domestik bruto (PDB) diganti dengan produk nasional bruto (PNB).

Fridarahma (2015 : 1) “Perkembangan metodologi IPM pada tahun 2010. UNDP memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode baru. Komponen IPM yang digunakan yaitu, angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), produk nasional bruto (PNB)”. Indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan manusia dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pengelompokan IPM ini bertujuan untuk melihat capaian IPM antar wilayah. Kategori pengelompokan IPM dibagi menjadi berikut :

1. IPM rendah : $IPM < 60$
2. IPM sedang : $60 < IPM < 70$
3. IPM tinggi : $70 < IPM < 80$
4. IPM sangat tinggi : $IPM > 80$

2.1.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) terdiri dari 3 dimensi pokok yaitu

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Melalui ketiga dimensi tersebut IPM dapat mengukur seberapa kemampuan suatu negara dalam mencapai target pembangunan. Ketiga dimensi yang digunakan untuk menghitung IPM tersebut masih memiliki pengertian yang sangat luas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka komponen – komponen yang mempengaruhi IPM dapat dijabarkan sebagai berikut (BPS. 2007 : 14-16) :

1. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara didunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, dipakai 100 dan minimum 0 (nol), yang menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

3. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli). UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP *adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar

bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

2.1.4 Rumus Indeks Pembangunan Manusia

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut (BPS. 2015) :

- Dimensi Kesehatan :

- Dimensi Pendidikan

- Dimensi Pengeluaran

Sehingga rumus IPM yaitu :

$$\sqrt{\text{_____}} \times 100$$

2.2 Belanja Pemerintah

2.2.1 Defenisi Belanja Pemerintah

Sondang (2009) dalam Rosiana (2021 :21) menyatakan bahwa :

Pemerintah dalam sebuah negara memiliki beberapa peran. Peran tersebut muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu peran dalam fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat pemerintah merancang strategi dan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan tentu memerlukan dana yang tidak sedikit dana yang dikeluarkan pemerintah disebut dengan belanja pemerintah.

Belanja pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C + I + G (X-M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional dengan membandingkan G dengan Y maka dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Berdasarkan Jenis

Realisasi belanja pemerintah berdasarkan jenis maksudnya adalah pengelompokan jenis-jenis belanja pemerintah. Belanja pemerintah dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. BPS Provinsi Sumatera Utara (2016).

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait

langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari : belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. belanja bantuan keuangan. belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dari jenis-jenis belanja diatas belanja langsung merupakan terkait langsung dengan program dan jenis belanja tersebut yaitu, belanja modal.

Mirza (2012 : 7) menyatakan bahwa :

Belanja modal ialah Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat atau disebut juga belanja pembangunan yang berupa pembangunan investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

2.2.3 Ciri-Ciri Belanja Modal Dan Cara Menghitungnya

Ibnu (2021 : 1) menyatakan bahwa :

Adapun ciri-ciri sederhana dari belanja modal adalah memiliki wujud, sifatnya yang semakin bertambah, memiliki periode mamfaat yang lebih dari satu tahun periode akutansi, dan nilainya yang relatif material. Selain itu, di dalamnya juga terdapat aset-aset dari hasil belanja modal yang tidak terwujud di dalam belanja modal. namun masih tetap mempunyai ciri yang sama dengan hasil belanja modal yang lain.

Cara menghitungnya rumus yang digunakan untuk menghitung belanja modal adalah sebagai berikut:

Belanja modal = kenaikan bersih dalam aset tetap + beban penyusutan

Dalam hal ini. harus Anda garis bawahi bahwa belanja modal adalah salah satu komponen yang bisa digunakan untuk menghitung PBD. Sehingga. penurunan belanja modal pun akan berkontribusi pada perlambatan ekonomi.

2.3 Ratio Ketergantungan

2.3.1 Defenisi Ratio Ketergantungan

Rosiana (2021 : 23) menyatakan :

Penduduk pada suatu negara dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi yaitu penduduk usia kerja (PUK) dan penduduk bukan usia kerja (BPUK).

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya belum dianggap sebagai penduduk yang belum produktif. karena secara ekonomis masih tergantung pada orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk yang berusia diatas 65 tahun juga dianggap sudah tidak produktif karena telah melewati masa pensiunya. Sedangkan penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang produktif. Atas dasar konsep tersebut mencerminkan bahwa terdapat penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja produktif atau dengan kata lain disebut dengan ratio ketergantungan.

Feriyanto (2014) dalam Rosiana (2021 :23) menyatakan “Ratio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun”. Ratio ketergantungan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Ratio ketergantungan muda, merupakan perbandingan usia 0-14 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.
2. Ratio ketergantungan tua, merupakan perbandingan penduduk usia 65 tahun keatas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Ratio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara dalam keadaan maju atau sedang berkembang. Semaking tinggi angka ratio ketergantungan menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) semakin tinggi untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif (65 tahun keatas).

Ratio ketergantungan yang tinggi akan menghambat proses pembangunan. Pendapatan yang diperoleh dari penduduk usia produktif harus dibagi kepada penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Semakin banyak penduduk yang belum produktif atau dengan kata lain semakin banyak angka

kelahiran bayi dan penduduk usia diatas 65 tahun atau angka harapan hidup yang tinggi akan menambah beban ketergantungan bagi penduduk usia produktif.

Angka ratio ketergantungan didapat dari perhitungan sebagai berikut :

$$RK = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

RK= Ratio Ketergantungan

P(0-14) = Jumlah penduduk usia muda atau belum produktif (0-14 Tahun)

P(65+) = Jumlah penduduk usia tidak produksi atau tua (65 Tahun keatas)

P(15-64) = Jumlah penduduk usia produktif (15-64 Tahun)

2.3.2 Fungsi Ratio Ketergantungan

Ratio ketergantungan memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Sebagai indikator demografi

Artinya perhitungan ratio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahun tingkat beban ketergantungan penduduk disuatu wilayah. Apabila ratio ketergantungan tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika ratio ketergantungan rendah beban ketergantunganya semakin rendah pula.

2. Sebagai indikator keadaan ekonomi suatu negara

Ratio ketergantungan menjadi indikator keadaan ekonomi suatu negara, artinya lewat perhitungan ini bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong negara maju atau masih ditahap negara berkembang.

2.3.3 Dampak Ratio Ketergantungan

Putri (2021 : 1) menyatakan bahwa :

Disebutkan dampak yang terjadi jika ratio ketergantungan disuatu negara besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan usia kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu negara yang memiliki ratio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi negara maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Defenisi Kemiskinan

Masalah yang sering dihadapi oleh suatu negara salah satunya yaitu kemiskinan. Berdasarkan undang-undang no 24 tahun (2004). dalam Rosiana (2021 : 23) menyatakan :

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan. kesehatan. pendidikan. pekerjaan. perumahan. air bersih. pertahanan. sumber daya alam. lingkungan hidup. rasa aman dari tindak kekerasan. dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena setiap kebutuhan masyarakat bermacam-macam maka kemiskinanpun meliputi beberapa aspek yaitu aspek primer miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial sumber keuangan dan informasi. Selain itu dimensi kemiskinan juga saling berkaitan artinya apabila terjadi penurunan atau kemajuan pada salah satu aspek maka akan mempengaruhi kemajuan atau penurunan pada aspek lainnya.

2.4.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Irhamni (2017) dalam Sitio (2019 : 25) penyebab terjadinya kemiskinan adalah :

Population growth. prespektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung. Akibatnya sumber daya bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan cepat. Hal itulah yang menimbulkan kemiskinan. akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. dengan berlaku keadaan ini maka penambahan penduduk tidak akan menaikkan produksi.

2.4.3 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah mengukurnya.

Menurut Purba. Tobing & Hutabarat (2015 : 75) menyatakan :

1. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan minimum tersebut antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (poverty line) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.
3. Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

BPS (2021) menyatakan :

Ukuran kemiskinan berdasarkan badan pusat statistik berikut ukuran

kemiskinan :

1. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis kemiskinan non makanan (GKMN) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.5 Hubungan Variabel-Variabel Penelitian.

2.5.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Komariah. D. Yogiantoro. M. & Hukom. A (2019 : 524) menyatakan bahwa :

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, secara makro pengeluaran pemerintah yang diproduksi melalui belanja modal diperuntukkan dan diprioritaskan untuk penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan publik terutama pada penyediaan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilihat melalui capaian kualitas hidup masyarakat yang diproksi kedalam indeks pembangunan manusia (IPM).

2.5.2 Pengaruh Ratio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Ratio ketergantungan menggambarkan perbandingan usia tidak produktif berbanding usia produktif. Semakin tinggi tingkat ratio ketergantungan semakin banyak pula beban tanggungan penduduk. Menurut Manik (2018) dalam Nugraeni (2021 : 11) menyatakan bahwa :

Banyaknya penduduk pada pembangunan ekonomi adalah salah satu

persoalan dasar, ini disebabkan tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Malthus dalam penelitian memaparkan tingginya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan keperluan konsumsi semakin meningkat dibandingkan dengan keperluan dalam berinvestasi dengan demikian sumber daya hanya diperuntukkan pada pengembangan tenaga kerja dibandingkan dengan memperbanyak aset yang mengakibatkan penyerapan tenaga kerja berjalan dengan lambat dan bertambahnya pengangguran. Tanggungan yang dibebankan pada negara berkembang bukan hanya akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk namun juga diakibatkan dari tingginya ratio ketergantungan. Tingkat ratio ketergantungan yang rendah akan memberikan mafaat bagi pembangunan nasional hal ini karena akan banyak usia produktif yang dapat bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas. Saat ratio ketergantungan mengalami penurunan hal ini dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

2.5.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia.

Sitio (2019 : 14-15) menyatakan :

Didalam teori pertumbuhan baru dijelaskan pentingnya peranan dari pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) mendorong berbagai penelitian. dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Hal ini dapat terlihat dari investasi pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang. maka pengetahuan dan keterampilan mendorong peningkatan produktivitas orang tersebut. Perusahaan akan memperoleh timbal balik dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja sehingga produktivitas yang dihasilkan tinggi dan perubahan tidak keberatan memberikan gaji yang tinggi bagi para pekerjanya. Di sektor informal seperti pertanian. peningkatan keterampilan dan keahlian akan mampu meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Karena dengan tenaga kerja yang terampil maka akan dapat bekerja secara efisien. Seseorang yang memiliki keahlian produktivitas yang tinggi kesejahteraanya akan meningkat. Hal ini bisa dibuktikan dari peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Novianto (2018) dalam Sitio (2019 : 14) menyatakan bahwa :

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan maksud semakin banyak jumlah penduduk miskin akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Jumlah penduduk miskin dinilai dari banyaknya rakyat yang belum memperoleh pendidikan. kesehatan.

dan lain sebagainya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui dan menjadi bahan untuk membandingkan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu, dengan maksud penelitian-penelitian terdahulu yang dipakai penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana (2021 : 63) dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah, Ratio Ketergantungan, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2019”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda data sekunder. hasil penelitian :

1. **Variabel Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan mempunyai pengaruh Positif dan signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012- 2019.**
2. **Variabel Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan mempunyai pengaruh Positif dan signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2019.**
3. **Variabel Ratio Ketergantungan mempunyai pengaruh Negatif dan signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2019.**
4. **Variabel Kemiskinan mempunyai pengaruh Negatif dan signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2019.**

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni, A. R., & Aji. T. S. (2021 : 1) dengan judul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ratio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 2014 2019”. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. hasil penelitian :

1. **Variabel Kemiskinan mempunyai pengaruh Negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 2014- 2019.**
2. **Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 2014-2019.**

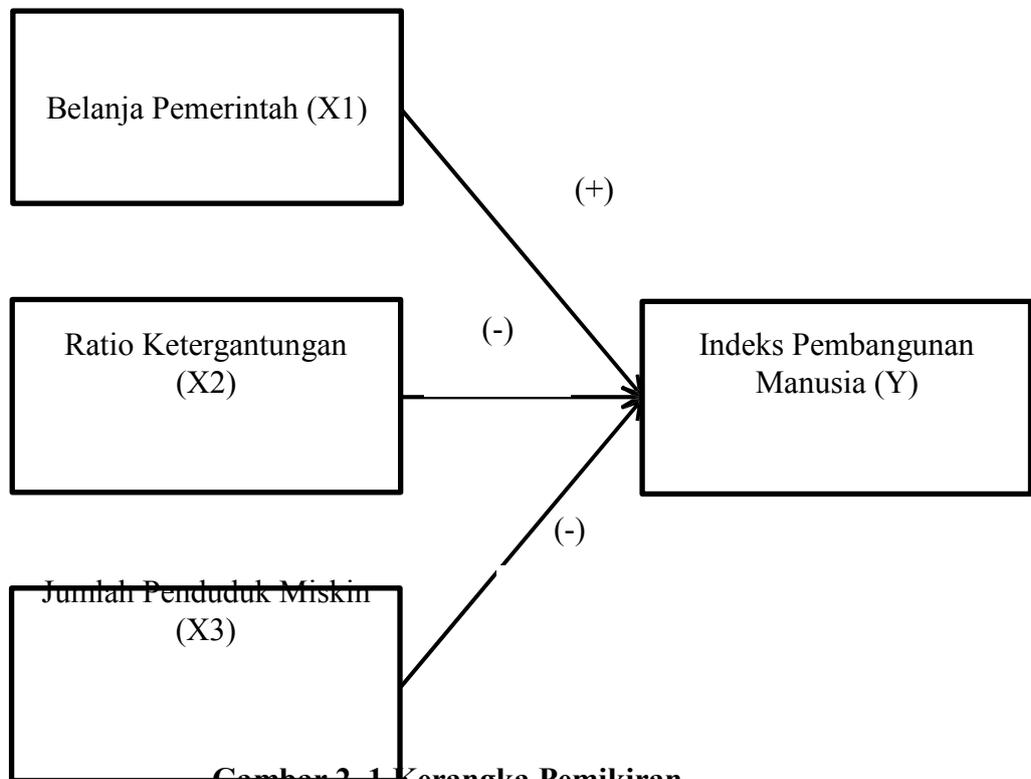
- 3. Variabel Ratio Ketergantungan mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 2014-2019.**
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012 : 1) dengan judul “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”. Penelitian menggunakan regresi panel. Hasil penelitian :
- 1. Variabel Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009.**
 - 2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009.**
 - 3. Variabel Belanja Modal mempunyai pengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009.**
4. Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati, E. Amril. A., & Zulfanetti. Z. (2017 : 1) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2009-2013”. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jenis data sekunder hasil regresi data panel menunjukkan:
- 1. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kab/kota Povinsi Bali 2009-2013.**
 - 2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kab/Kota Provinsi Bali 2009-2013.**
 - 3. Variabel Kemiskinan berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kab/Kota Provinsi Bali 2009-2013.**
5. Penelitian yang dilakukan Komariah, D., Yogiantoro. M., & Hukom. A (2019 : 1) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2009-2017". Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian :

- 1. Variabel Belanja Modal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2009-2017.**
- 2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2009-2017.**

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu belanja pemerintah sektor modal, ratio ketergantungan, jumlah penduduk miskin yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Berdasarkan penelitian terdahulu uraian teoritis, hubungan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan yang kebenarannya perlu dikaji dan diteliti melalui data yang dihimpun dari berbagai sumber yang jelas dan akurat yang dilakukan peneliti sebagai pembanding adalah sebagai berikut :

1. Belanja pemerintah sektor modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020.
2. Ratio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020.
3. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010- 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah di Provinsi Sumatera Utara. dengan menganalisis belanja pemerintah, ratio ketergantungan, jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak dihimpung secara langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dan yang dikumpulkan adalah meliputi data belanja pemerintah sektor modal, ratio ketergantungan, jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Jangka waktunya tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Model Ekonometrik

Untuk mengetahui pengaruh dari belanja pemerintah sektor modal, ratio ketergantungan, jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara maka akan dianalisis dengan menggunakan metode ekonometrik, akan dijelaskan analisis struktural, yaitu untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi yang terdapat dalam model. Analisis struktural berfungsi untuk memahami ulang kuantitatif pengujian dan validasi hubungan ekonomi.

3.3.2 Penduggaan Model Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linear berganda. Model persamaannya regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 X_{1i} + \hat{\alpha}_2 X_{2i} + \hat{\alpha}_3 X_{3i} + \varepsilon_i \quad i=1, 2, 3, \dots, n.$$

dimana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

$\hat{\alpha}_0$ = Intersep

$\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2, \hat{\alpha}_3$ = Koefisien regresi (Statistik)

X_1 = Belanja Modal (Miliar Rupiah)

X_2 = Ratio Ketergantungan (%)

X_3 = Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)

ε_i = Galat (*Error term*)

3.3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian uji-t dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$.

1. Belanja pemerintah (X1)

$H_0: \alpha_1 = 0$. artinya belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara 2010-2020.

$H_1: \alpha_1 > 0$. artinya belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara 2010-2020.

2. Ratio Ketergantungan

$H_0 : \beta_2 = 0$. artinya ratio ketergantungan tidak berpengaruh terhadap Indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara 2010-2020.

$H_1 : \beta_2 < 0$. artinya ratio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara 2010-2020.

3. Jumlah Penduduk Miskin

$H_0 : \beta_3 = 0$. artinya jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara 2010-2020.

$H_1 : \beta_3 < 0$. artinya jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara 2010-2020.

Data mengubah pendugaan kuadrat terkecil (OLS) penduga terhadap model regresi linier berganda di atas. Akan dijelaskan arti pendugaan model terdapat depresiasi regresi, apakah benar secara ekonometrik.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai $prob < \alpha$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t

pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik $< 0,05\%$ maka ditolak diterima.
2. Jika nilai *probability* t-statistik $> 0,05\%$ maka diterima ditolak

3.3.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i$ tidak semua nol. $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator ($k-1$) dan df untuk denominator ($n- k$).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :
$$\frac{JKR (k - 1)}{JKG (n - k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Uji F (uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang

diestimasi layak atau tidak. Layak berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas (signifikan) < 0.05 atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka ditolak dan diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) > 0.05 atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka diterima dan ditolak.

3.4 Uji Kebaikan Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menjelaskan hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara 0 dan 1, Jika R^2 mendekati angka satu artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya” Widarjono (2013 :24).

3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk hubungan apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikorelasi) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Widarjono (2013 :101).

Ada beberapa cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas. sebagai berikut:

1. Bila nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) < 10 . disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.
2. Bila nilai Tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) > 10 . disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.

3.5.2 Uji Autokorelasi

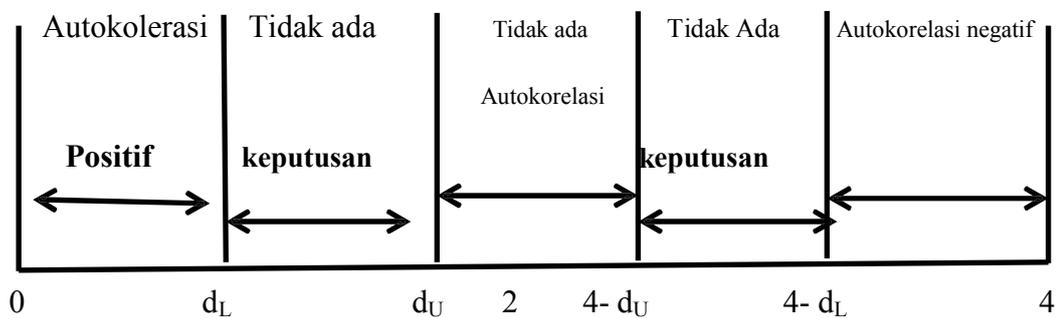
a. Uji Durbin-Watson

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi. maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu : Uji Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan DW hitung dengan DW tabel. Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien.

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α .

Secara umum bisa diambil patokan :



Gambar 3.1 Uji Durbin-Watson

$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis 0
$d_L < d < d_U$	Daerah Keragu-raguan
$d_U < d < 4 - d_U$	Gagal Menolak Hipotesis 0
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	Daerah Keragu-raguan
$4 - d_L < d < 4$	Menolak Hipotesis 0

b. Uji Run

Untuk mengetahui atau mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan dengan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random.

Ghozali dalam Manik (2020 : 28) berpendapat “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak”

Cara yang digunakan dalam uji run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) random (acak)

H_1 : Galat (res_1) tidak random

c. Cara Mengatasi Multikolinieritas

Menurut Widarjono (2013 : 108-109) menyatakan :

Jika model mengandung yang serius yakni korelasi yang antar variabel independen. maka apa yang harus dilakukan Ada dua pilihan yaitu kita membiarkan model tetap mengandung multikolinieritas dan kita akan memperbaiki model supaya terbebas dari masalah multikolinieritas

1. Tanpa ada perbaikan

Masalah multikolinieritas biasanya juga timbul karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit.

2. Dengan perbaikan

Masalah multikolinieritas dengan perbaikan menggunakan tiga cara yaitu :

- a. Menghilangkan variabel independen
- b. Transformasi variabel
- c. Penambahan data

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan F mangasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis uji statistik. Analisis Statistik Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau titik hati-hati secara visual.

Ghozali dalam Manik (2020:30) “untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak. dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)”. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal.

3.6 Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Pemerintah Sektor Modal

Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat dengan tujuan menambah aset kekayaan daerah, untuk kemajuan daerah atau disebut juga belanja pembangunan yang berupa pembangunan investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Data yang digunakan dalam proses penelitian adalah belanja pemerintah sektor modal di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020 dengan satuan miliar rupiah.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besar dari beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Dalam penelitian ini digunakan data rasio ketergantungan Provinsi di Sumatera Utara tahun 2010-2020 dengan satuan persen (%).

3. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin merupakan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. yaitu yang memiliki ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini digunakan data jumlah

penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020 dengan satuan ribu jiwa.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu alat yang bertujuan untuk melihat kondisi pembangunan yang dipusatkan pada kondisi penduduknya dengan menggunakan 3 indikator komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (BPS 2007). Dalam penelitian ini digunakan data yaitu IPM di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2020 dengan satuan indeks 0-100.